

## Dinamika Covid-19 dan Peran Stakeholders dalam Praktik Pengembangan Konsep *Collaborative Governance*

Febi Febriana<sup>1</sup>, M. Zaki Putra<sup>2</sup>, Niken Suryadita<sup>3</sup>, Goestyari Kurnia Amantha<sup>4</sup>

<sup>123</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Lampung

<sup>123</sup> Jl. Z.A Pagar Alam No. 14 Labuhan Ratu, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung, 35132

<sup>4</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung

<sup>4</sup> Jalan Prof. Dr Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No.1, Kota Bandar Lampung, Lampung 35141

email: febifebriana33@gmail.com<sup>1</sup>; zaki.zk69@gmail.com<sup>2</sup>; nikensryd@gmail.com<sup>3</sup>;

gustiarikurniaamantha@gmail.com<sup>4</sup>;

### Abstract

*Public policies issued by the government to overcome the Covid-19 have reaped pros and cons in society. The dynamics of problems have emerged which have resulted in increasingly chaotic relations between the government and society. This is due to the lack of coordination in the delivery of information to the public. Confusion of information causes people to lack confidence in all information about Covid-19, starting from the increasing number of cases, lack of public awareness to participate in suppressing the growth rate of Covid-19, public distrust of vaccines and lack of dissemination of knowledge about the effectiveness of vaccines. Based on the information obtained, this paper aims to describe several things, namely (1) the dynamics of the Covid-19 pandemic problem, (2) the causes of the dynamics and fluctuation of problems during the pandemic, (3) strategies to prevent and overcome the turmoil and dynamics that occur. happens in society. The emergence of the dynamics that occur requires adjustments, synergies, and coordination between the community and the government as stakeholders in the seriousness of handling the Covid-19.. Therefore, a strategy is needed to overcome this, namely the formulation of relevant policies, the reconstruction of the Covid-19 handling system and the delivery of information to the public, and the implementation of technical measures in accordance with the provisions for handling Covid-19. The Covid-19 problem in Indonesia requires the concept of collaborative governance, the government collaborates with various parties, including establishing relationships with the regions, the private sector, and the community.*

**Keywords:** Covid-19; stakeholders; Collaboration; Government;

### Abstrak

Kebijakan Publik yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi Covid-19 menuai pro dan kontra di masyarakat. Permasalahan yang bermunculan mengakibatkan kisruh hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Hal itu disebabkan oleh belum siapnya pemerintah dan kurangnya koordinasi dalam penyampaian informasi ke publik sehingga mengakibatkan masyarakat kurang percaya terkait segala informasi mengenai Covid-19, seperti jumlah penambahan kasus, kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam menekan laju pertumbuhan Covid-19, serta ketidakpercayaan masyarakat terhadap keefektifan vaksin. Berdasarkan informasi yang didapat, karya tulis ini bertujuan untuk mendeskripsikan beberapa hal yaitu (1) dinamika permasalahan Covid-19, (2) penyebab terjadinya permasalahan pada masa pandemi, (3) strategi dalam mencegah dan mengatasi terjadinya dinamika yang terjadi di masyarakat. Munculnya dinamika yang terjadi, dibutuhkan adanya penyesuaian, sinergi, dan koordinasi antara masyarakat dan pemerintah (stakeholders) dalam penanganan Covid-19. Oleh karena itu, dibutuhkan formulasi kebijakan yang relevan, rekonstruksi sistem penanganan dan penyampaian informasi di masyarakat, serta pelaksanaan tindakan teknis yang sesuai dengan ketentuan penanganan. Permasalahan Covid-19 di Indonesia, memerlukan adanya konsep Collaborative governance, pemerintah berkolaborasi dengan berbagai pihak diantaranya menjalin hubungan dengan daerah, swasta, dan masyarakat.

**Keywords:** Covid-19; Stakeholders; Kolaborasi; Pemerintah;

\*)Penulis Korespondensi

E-mail : : gustiarikurniaamantha@gmail.com

### Pembahasan

*Collaborative governance* muncul untuk merespons terjadinya kegagalan implementasi, biaya mahal, dan politisasi regulasi sektor publik (Ansell dan Gash,2007). *Collaborative governance* merupakan sebuah paradigma baru dalam memahami eksistensi

multi stakeholders dalam urusan publik yang mengarah pada setiap tahapan kebijakan publik WHO menyatakan kondisi darurat kesehatan di dunia, karena virus SARS Cov-2 yang menyerang saluran pernapasan yang melanda dunia pada Desember 2019 di Wuhan, China. 2 Maret 2020, pemerintah mengumumkan kasus pertama Covid-19 di Indonesia. April 2021 kasus terkonfirmasi positif mencapai angka 1.614.849 dan 5.549 kasus per hari. Penambahan kasus positif diikuti juga dengan meningkatnya jumlah pasien sembuh (negative). Sementara kasus kematian 43.777 orang. Awalnya pemerintah belum siap menangani darurat kesehatan yang terjadi (cenderung meremehkan) dan masyarakat belum percaya bahkan menganggap sebagai informasi palsu, kurangnya pengetahuan dan anggapan Covid-19 adalah penyakit baru. Pemerintah melakukan upaya-upaya penanganan dengan mengeluarkan sejumlah aturan guna menekan penyebaran, dalam bentuk Perpres, PP hingga Keppres. Salah satunya: Keppres No.07 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 serta melakukan Pembatasan Sosial berskala Besar dan menentukan protokol kesehatan: 3M (memakai masker, menjaga jarak (hindari kerumunan), mencuci tangan pakai sabun) dan pemerintah menyiapkan vaksin sebagai upaya penanganan Covid-19.

Permasalahan yang terjadi disebabkan karena kurangnya pengetahuan, kepercayaan masyarakat, belum siapnya pemerintah, serta belum adanya kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan, serta lumpuhnya perekonomian. Dipengaruhi karena *stakeholders* memiliki hubungan signifikan antara pemerintah dan masyarakat terkait kebijakan yang diambil pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya permasalahan pada masa pandemi serta memaparkan strategi dalam mencegah dan mengatasi terjadinya dinamika yang berlebihan di masyarakat.

Studi karya tulis ini menggunakan literatur (kepuustakaan) pengumpulan informasi dan data dari penelitian sebelumnya. Sumber data bahan penelitian berupa buku dan jurnal. Menurut Khatibah (2011), kepuustakaan sebagai kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode/teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi melalui penelitian kepuustakaan.

*Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) penularannya sangat cepat, kasus positif mencapai 1000 orang perhari. Covid-19 diumumkan sebagai pandemi oleh WHO, Pandemi adalah epidemi penyakit yang menyebar di wilayah yang luas. Beberapa sample penelitian menunjukkan bahwa virus ini menular dari udara. Virus ini berasal dari kelelawar yang menular ke manusia. Di Indonesia, berawal ketika seorang warga negara asing berasal dari Jepang mengeluh demam, batuk dan sesak nafas, gejala ringan termasuk pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam, gejala ini sangat umum terjadi, sehingga membuat daftar Pasien Dalam Pengawasan meningkat secara drastis. Covid-19 menjadi perhatian penting bidang medis, karena penyebarannya yang cepat dan berpotensi menyebabkan kolaps sistem kesehatan, serta beragamnya manifestasi klinis pada pasien (Vollono dkk., 2020).

Covid-19 menyebabkan kematian yang membuat kepanikan secara global. Kasus positif terus bertambah setiap harinya, sehingga perlu tindakan pencegahan untuk membendung penyebaran. Kebijakan pemerintah mengenai penanganan menjadi isu yang sentral, karena melibatkan banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses perumusan, implementasi, ataupun dalam proses evaluasi.

Carl J Frederick mendefinisikan kebijakan sebagai rangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok/pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan dan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Donahue dan Zeckhauser (2011 : 4), *collaborative governance* merupakan kondisi dimana pemerintah untuk memenuhi tujuan publik melalui kolaborasi antar organisasi maupun individu. Sebuah pendekatan pengambilan keputusan, tata kelola kolaboratif, serangkaian aktivitas bersama dimana mitra saling menghasilkan tujuan dan strategi, berbagi tanggung jawab dan sumber daya (Davies Althea L Rehema M. White, 2012)

*Collaborative governance* menekankan segala aspek yang memiliki kepentingan dalam kebijakan membuat persetujuan bersama dengan “berbagi kekuatan”. (Taylor Brent and Rob C. de Loe, 2012). Emerson (2013) melihat dinamika proses kolaborasi sebagai siklus interaksi yang oriteratif. Ada 3 komponen interaksi dinamika kolaborasi: penggerakan prinsip bersama, motivasi bersama, dan kapasitas untuk melakukan tindakan bersama. *Collaborative Governance* dan peran pemerintah selaku stakeholders diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang ada. Untuk itu perlu adanya koordinasi dan kolaborasi seluruh pihak agar Covid-19 berakhir.

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (kepuustakaan) terhadap konsep *collaborative governance* dan kaitannya dengan permasalahan Covid-19 di Indonesia yang datanya diambil dari beberapa jurnal dan opini publik. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan research data dari berbagai sumber pustaka dan media online. Teknik analisa dilakukan dengan menganalisis data kualitatif melalui pendekatan *content analysis* yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isu suatu informasi tertulis/tercetak dalam media massa. Data diolah dan disajikan dalam pemaparan secara deskriptif. Pengukuran variabel dilakukan dengan mengklasifikasikan, meringkas dan mentabulasi data. Untuk menguji validitas dilakukan *crosscheck* data yang diperoleh dengan data lainnya.

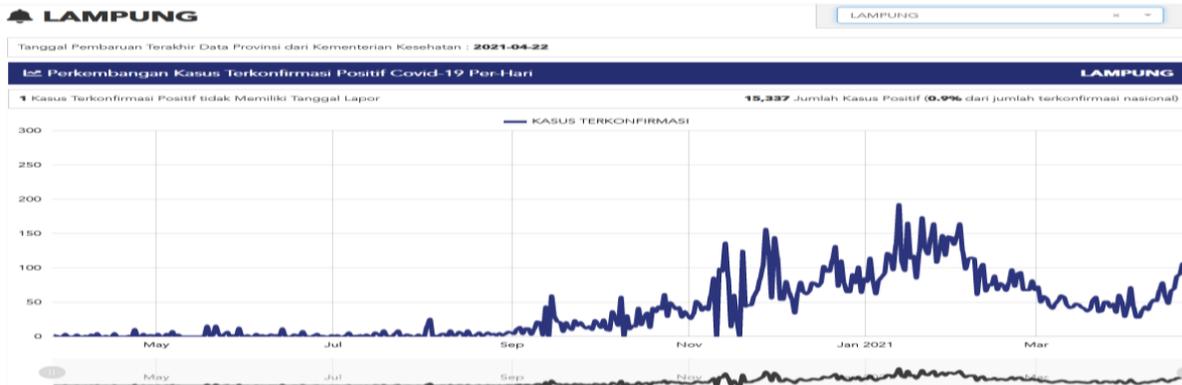
## Hasil dan Pembahasan

Penanganan Covid-19 di Indonesia memasuki situasi baru, seiring dengan kabar proses vaksin yang sudah beredar. Indonesia menggunakan beberapa vaksin: Cansino, G42/Sinopharm dan SinoVac. Vaksin memang ditunggu banyak orang, adanya vaksin berperan sebagai pencegah dan obat. Sebelum pemerataan vaksin, protokol kesehatan masih perlu digunakan.

November 2020, tercatat 470 ribu orang terkonfirmasi positif. Angka ini terus meningkat hingga menyentuh angka 1 juta di Januari 2021. Dari sejumlah orang terkonfirmasi positif, yang meninggal lebih dari 29 ribu, dan sembuh lebih dari 852 ribu orang (covid19.go.id, 2021). April 2021, terdapat 148 jt kasus, 85,9 jt sembuh dan Meninggal dunia 3,13 jt di seluruh dunia. Pemerintah memberi himbauan pencegahan Covid-19 dengan: a). Isolasi mandiri, b). Deteksi dini, c). PPKM, yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang memungkinkan masyarakat menjalankan aktivitasnya tetapi dibatasi guna meminimalisir penularan, d). 3M : menjaga jarak dan menghindari kerumunan, memakai masker, dan mencuci tangan, e). Pembentukan Satgas Percepatan Penanganan Covid-19, f). Memeriksa diri jika teridentifikasi ciri-ciri terpapar Covid-19.

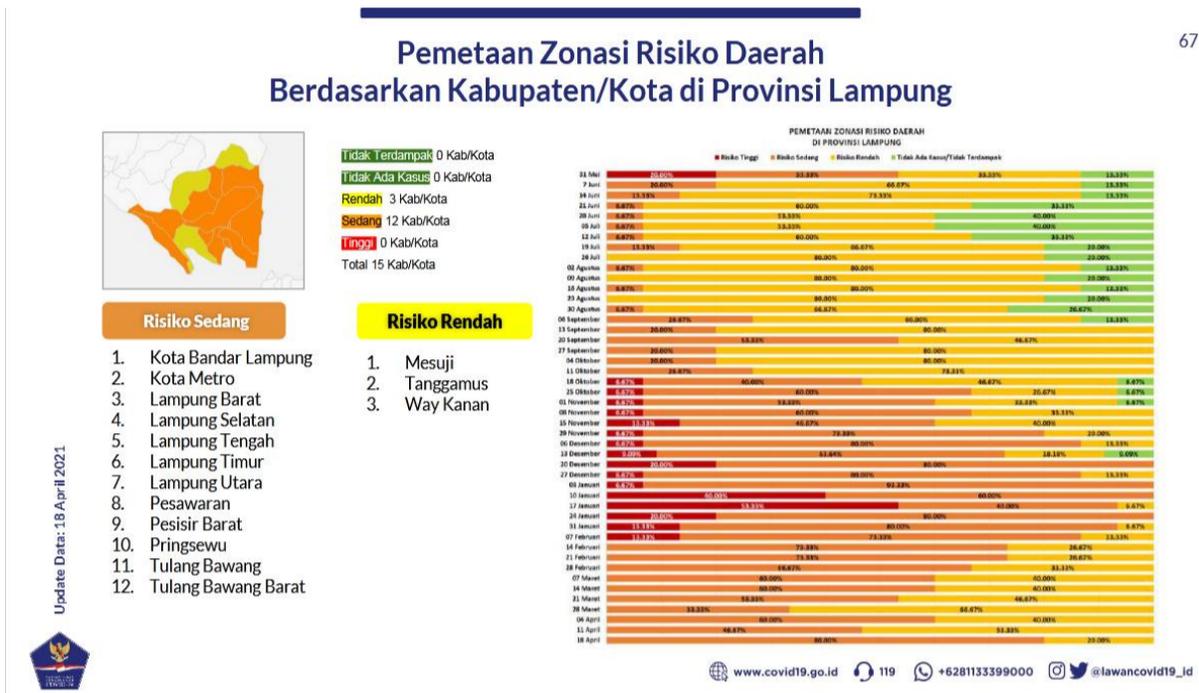
**Tabel Data Pantauan Covid-19 Provinsi Lampung Tanggal Pembaruan : 2021-04-22**

	Terkonfirmasi terpapar Covid-19	Kematian	Selesai Isolasi/sembuh
Kasus Paparan Covid-19	<b>15,337</b> Kasus Positif (0.9% dari jumlah terkonfirmasi nasional)	<b>798</b> Kasus Meninggal (5.2% dari jumlah terkonfirmasi provinsi)	<b>13,405</b> Kasus Sembuh (87.4% dari jumlah terkonfirmasi provinsi)



Grafik 1. Perkembangan Kasus Covid-19 Per-Hari

Sumber: <https://covid19.go.id/peta-sebaran>



Gambar 1. Pemetaan Zonasi Risiko Daerah Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

Sumber: <https://covid19.go.id/berita/analisis-data-covid-19-indonesia-update-18-april-2021>



Gambar 2. Situasi Covid-19 di Indonesia

Sumber: <https://covid19.go.id/berita/data-vaksinasi-covid-19-update-23-april-2021>

Di Bandar Lampung, pembatasan dilakukan dengan membatasi kegiatan masyarakat, menutup tempat kerumunan, menerapkan protokol kesehatan, serta pelaksanaan proses pembelajaran *online*. Di era *new normal*, tempat yang terjadi kerumunan dibuka dengan syarat penegakkan protokol kesehatan untuk meminimalisir

peyebaran. Kebijakan tersebut menuntut masyarakat beraktivitas seperti biasa dengan memperhatikan protokol kesehatan.

Ketidakpercayaan masyarakat atas kebijakan pemerintah membuat stigma bahwa Covid-19 adalah ladang bisnis bagi *stakeholders* dan kebijakan yang ada hanya membawa kesengsaraan bagi masyarakat. Untuk itu para *stakeholders* diharapkan mampu bersinergi, bekerjasama dan berkoordinasi untuk menangani Covid-19 yang berlarut-larut.

3 (tiga) komponen interaksi dari *collaborative governance* yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengatasi dinamika yang terjadi yaitu:

1. Penggerakan prinsip bersama, Seperti: melaksanakan protokol kesehatan, melakukan kegiatan pendidikan (pembelajaran) dari rumah secara daring, dan PPKM. Diperlukan 3 hal agar penggerakan prinsip bersama terwujud yaitu:
  - Pengungkapan (*discovery*).
  - Deliberasi (*deliberation*)
  - Determinasi
2. Motivasi bersama, mekanisme yang menghasilkan rasa saling mengerti antar *stakeholders* yang pada akhirnya melahirkan legitimasi bersama dan bermuara pada komitmen bersama untuk mengesampingkan urusan individu/kelompok demi memahami kepentingan, kebutuhan, nilai, dan tujuan bersama untuk mengatasi Covid-19.
3. Kapasitas untuk melakukan tindakan bersama, kolaborasi melibatkan aktivitas kooperatif untuk meningkatkan kapasitas diri dan orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Hal ini juga dapat memperkuat motivasi bersama dan penggerakkan prinsip bersama yang memastikan tindakan dan dampak kolaborasi yang lebih efektif. Adapun elemennya yaitu:
  - Prosedur dan kesepakatan institusi (*procedural and institutional arrangements*) : berbagai prosedur dan protokol, serta struktur kolaborasi dibutuhkan dalam manajemen interaksi antar *stakeholders*.
  - Kepemimpinan (*leadership*), peran kepemimpinan selama proses kolaborasi yaitu: (1) sebagai pihak yang menggali dukungan untuk kolaborasi, (2) penginisiasi pertemuan, (3) fasilitator dan mediator, (4) representasi dari *stakeholders*, (5) pendistributor pengetahuan, (6) mendorong penggunaan teknologi dalam kolaborasi, (7) melakukan advokasi pada publik.
  - Pengetahuan (*knowledge*) : kombinasi dari informasi dengan memahami informasi dan menambah kapabilitas. Yang terpenting adalah bagaimana mendistribusikan pengetahuan dan para *stakeholders* memanfaatkannya, sehingga berguna bagi proses kolaborasi.
  - Sumber daya (*resources*) : adanya pertukaran maupun penggabungan sumber daya merupakan salah satu keuntungan kolaborasi.

Tindakan kolaborasi harus diungkapkan secara tersirat dengan perumusan tujuan yang jelas. Karena akan sulit melakukan *collaborative governance* jika tujuan yang ingin dicapai tidak dibuat secara eksplisit. Untuk mencegah terjadinya gejolak yang berlebihan di masyarakat terkait kebijakan vaksin maka diperlukan adanya penggerakan prinsip bersama dari *stakeholders* terkait, kemudian dilakukan pengungkapan kepentingan dan pembagian, menerapkan maksud dan tujuannya dengan diikuti peningkatan kualitas kebijakan. Melakukan sosialisasi terkait pemerataan pemberian vaksin dan tentang dampak serta manfaatnya serta informasi yang diberikan harus akurat dan tidak multitafsir.

Sering terjadi multitafsir kebijakan yang diberikan kepada masyarakat, seperti larangan mudik dan pulang kampung serta kebijakan PPKM. Pemerintah selaku *stakeholders* memegang peranan penting untuk mengatasi konflik dan perbedaan penafsiran dari setiap kebijakan yang ada. Seharusnya Pemerintah memberikan kebijakan yang relevan. Pemerintah harus tegas sehingga kebijakan yang diberikan tidak tumpang tindih. Kedisiplinan masyarakat menjadi kunci pencegahan, Masyarakat harus meningkatkan penerapan protokol kesehatan dan mematuhi kebijakan pemerintah.

Untuk itu perlu diadakannya peningkatan dan pengawasan mengenai pelaksanaan *collaborative governance* dengan koordinasi berbagai pihak agar serius dalam penanganannya.

Untuk mengatasi dinamika yang terjadi di masyarakat, berbagai *stakeholders* baik itu masyarakat maupun pemerintah diharapkan melakukan tindakan bersama dan berkomitmen untuk bekerjasama mengimplementasikan kebijakan yang dibuat sebagai tujuan *collaborative governance* untuk menghasilkan outcome yang diinginkan bersama yaitu agar Covid-19 di Indonesia dapat berakhir.

### **Kesimpulan**

Kerangka *collaborative governance* memberikan suatu pemaknaan yang lebih dari sekedar *governance*. *Collaborative governance* merupakan kondisi dimana pemerintah memenuhi tujuan publik melalui kolaborasi antar organisasi maupun individu. Permasalahan yang terjadi di masa pandemi disebabkan adanya ketidakpercayaan masyarakat atas kebijakan pemerintah dan pengimplementasiannya. Kebijakan publik pemerintah mengenai penanganan Covid-19 menjadi isu yang sentral, karena dalam kebijakan publik melibatkan banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses perumusan, implementasi, ataupun dalam proses evaluasi. Disebabkan oleh kesimpang-siuran dan tidak adanya koordinasi terkait informasi yang diberikan kepada masyarakat. *Collaborative Governance* dan peran pemerintah selaku *stakeholders* diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang ada. Dibutuhkan adanya penyesuaian, sinergi, dan koordinasi antara masyarakat dan pemerintah selaku *stakeholders*. Oleh karena itu, dibutuhkan formulasi kebijakan yang relevan, rekonstruksi sistem penanganan dan penyampaian informasi di masyarakat, serta pelaksanaan tindakan teknis yang sesuai dengan ketentuan penanganan Covid-19. Selain itu untuk mengatasi dinamika yang terjadi di masyarakat, berbagai *stakeholders* baik itu masyarakat maupun pemerintah diharapkan melakukan tindakan bersama dan berkomitmen untuk bekerjasama mengimplementasikan kebijakan sebagai tujuan *collaborative governance* untuk menghasilkan *outcome* yang diinginkan. Jadi disimpulkan bahwa dinamika permasalahan Covid-19 perlu dicermati dan dicari strategi terbaik untuk mengatasinya agar Covid-19 cepat berakhir.

### **Ucapan Terimakasih**

Kami ingin mengucapkan terima kasih Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Muhammadiyah Lampung & Universitas Lampung.

### **Daftar Pustaka**

- Akbar, I. (2021). Vaksinasi Covid-19 dan Kebijakan Negara: Perspektif Ekonomi Politik. *Jurnal Academia Praja*, 4(1), 244–254.
- Arrozaaq, D. L. C. (2016). Collaborative Governance (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo). *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3, 1–13. Retrieved from <http://repository.unair.ac.id/67685/>
- Dewi, N. (2019). Dinamika Collaborative Governance Dalam Studi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3(2), 200. <https://doi.org/10.38043/jids.v3i2.2188>
- Triani, N. (2021). *Tinjauan Pustaka Covid-19: Virologi, Patogenesis, Dan Manifestasi Klinis*. Ejournalmalahayati.ac.id., from <http://ejournalmalahayati.ac.id/index.php/medika/article/viewFile/3174/pdf>.

- Rahmatunnisa, M. (2019). Dialektika Konsep Dynamic Governance. *Jurnal Academia Praja*, 2(02). <https://doi.org/10.36859/jap.v2i02.116>
- Sufianto, D. (2018). Pamong Praja. *Jurnal Academia Praja*, 1(01), 1-20. <https://doi.org/10.36859/jap.v1i01.27>
- Yuliana, Y. (2020). Corona virus diseases (Covid-19): Sebuah tinjauan literatur. *Wellness And Healthy Magazine*, 2(1), 187-192. <https://doi.org/10.30604/well.95212020>